

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Media Sosial**

##### **1. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah jenis media yang mencakup situs dan aplikasi yang menggunakan teknologi internet. Media ini memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan berbagai orang, baik yang dikenal maupun yang belum pernah dikenal sebelumnya (Musiin, 2020:12). Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan ideologi dan teknologi web, yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan berbagi konten yang mereka hasilkan sendiri (Aichner et al., 2021:219).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jejaring sosial adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk membuat halaman web pribadi dan terhubung dengan teman-teman untuk bertukar informasi serta berkomunikasi. Contoh jejaring sosial yang populer meliputi Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter. Berbeda dengan media tradisional seperti media cetak dan radio yang tidak menggunakan internet, jejaring sosial menggunakan internet sebagai dasar operasionalnya. Siapa pun dapat berpartisipasi dalam jejaring sosial, yang mudah diakses melalui smartphone, serta memungkinkan kontribusi, umpan balik, komentar, dan berbagi informasi secara cepat dan tanpa batas waktu.

##### **2. Fungsi Media Sosial**

Saat ini, media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola perilaku manusia dan berbagai aspek kehidupan. Kekuatan besar yang dimiliki media sosial saat ini menjadikan fungsi media sosial sangat signifikan. Beberapa fungsi media sosial antara lain sebagai berikut:

- a. Media sosial merupakan suatu bentuk media yang diciptakan untuk memperluas interaksi antar manusia dalam konteks sosial melalui penggunaan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri (Arum Wahyuni Purbohastuti, 2017:215).

Kesimpulan dari paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan modern, terutama dalam membentuk pola perilaku dan interaksi sosial manusia. Media sosial tidak hanya memperluas interaksi antar manusia melalui teknologi internet, tetapi juga mengubah cara komunikasi dari model satu arah (*one to many*) menjadi model dialogis (*many to many*). Selain itu, media sosial mendukung proses demokratisasi pengetahuan dan informasi, di mana pengguna tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga berperan aktif sebagai pembuat pesan itu sendiri.

### 3. Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari media tradisional, sebagaimana dijelaskan oleh Nasrullah. Beberapa karakteristik utama dari media sosial ini mencakup jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna. Masing-masing elemen ini memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem media sosial yang dinamis dan interaktif. Nasrullah menyatakan bahwa karakter khusus *media sosial* meliputi sebagai berikut.

- a. Jaringan (*network*) Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.

- b. Informasi (*information*) Informasi menjadi entitas penting di *media sosial* karena pengguna *media sosial* mengkreasikan representasi indentitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
- c. Arsip (*archive*) Bagi pengguna *media sosial*, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun.
- d. Interaksi (*interactivity*) *Media sosial* membentuk jaringan antarpengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antarpengguna tersebut.
- e. Simulasi Sosial (*simulation of society*) *Media sosial* memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. *Media sosial* memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang nyata.
- f. Konten oleh Pengguna (*user-generated content*) Di *media sosial*, konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC (*user generated content*) merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan kekuasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) ketika khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan (Musinin, 2020:14-15).

Kesimpulan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa media sosial memiliki ciri-ciri yang unik dan membedakannya dari media tradisional, memungkinkan fungsinya sebagai platform yang menghubungkan pengguna tidak hanya secara teknis tetapi juga dalam aspek sosial dan budaya. Komponen-komponen utama seperti jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, dan konten yang dihasilkan oleh pengguna menjadi dasar dari ekosistem media sosial. Elemen-elemen ini memungkinkan pengguna untuk tidak hanya berkomunikasi dan berbagi

informasi, tetapi juga membentuk identitas, terlibat dalam komunitas virtual, serta berkontribusi aktif dalam penciptaan konten. Dengan demikian, media sosial berperan lebih dari sekadar alat komunikasi; ia menjadi ruang di mana masyarakat virtual terbentuk dan berkembang, sering kali dengan pola interaksi yang berbeda dari masyarakat nyata. Karakteristik ini menunjukkan bahwa media sosial adalah fenomena yang kompleks dan memainkan peran penting dalam kehidupan digital masa kini.

#### 4. Jenis-Jenis Media Sosial

Untuk memahami pentingnya peran media sosial dalam strategi pemasaran modern, Kotler dan Keller mengidentifikasi tiga jenis platform atau media sosial utama yang mendukung interaksi digital antara perusahaan dan pelanggan. Platform-platform ini, yaitu komunitas online dan forum, blog, serta jaringan sosial, masing-masing menawarkan peluang unik bagi perusahaan untuk terlibat langsung dengan konsumen, membangun hubungan, dan mempengaruhi opini publik. Menurut Kotler dan Keller bahwa terdapat tiga macam platform yang utama untuk media sosial.

- a. *Online Communities And Forums*. Komunitas online dan forum tersebut datang dalam segala bentuk dan ukuran dimana banyak dibuat oleh pelanggan ataupun kelompok yang pelanggan tanpa adanya bunga komersial ataupun dengan afiliasi perusahaan. Sebagian hal ini disponsori oleh perusahaan yang anggotanya berkomunikasi dengan perusahaan dan dengan satu sama lain yang melalui posting, *instant messaging*, dan juga *chatting* yang berdiskusi mengenai minat khusus yang dapat berhubungan dengan produk perusahaan dan merek.
- b. *Blogs*. Terdapat tiga juta pengguna *blog* dan mereka yang sangat beragam, yang beberapa pribadi untuk teman-teman dekat dan keluarga, lainnya dirancang untuk menjangkau dan juga mempengaruhi khalayak luas.
- c. *Social Networks*. Jaringan sosial telah menjadi kekuatan yang penting

baik dalam bisnis konsumen dan juga pemasaran bisnis ke bisnis. Salah satunya dari *Facebook*, *Messenger*, *Twitter*, *WhatsApp* dll. Jaringan yang berbeda tersebut menawarkan manfaat yang berbeda pula untuk perusahaan (Arum Wahyuni Purbohastuti, 2017:216-217).

## 5. Dampak Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Heinlein berpendapat bahwa dalam penggunaan media sosial, terutama di era saat ini, penggunaan media sosial dapat memiliki dampak psikologis, sikap, kognitif, atau perilaku yang berubah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari (Ahmad, 2020:138-139).

Efek atau dampak dari penggunaan media sosial yang dinyatakan oleh Andreas Kaplan dan Michael Heinlein dapat disimpulkan bahwa media sosial tersebut bisa saja menguntungkan bagi penggunanya, seperti memperluas jaringan komunikasi individu, dapat mempermudah aktivitas sehari-hari, dan meningkatkan kemampuan individu. Namun, sebaliknya ada juga dampak negatif yang berbahaya bagi kehidupan pribadi para pengguna media.

*BBC Future* melakukan riset terkait dampak negatif sosial yang ditimbulkan dari penggunaan *media sosial* ini, diantaranya :

- a. *Media sosial* dapat menyebabkan stres. Kesimpulan ini didasarkan padapenelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center* (2015) di Washington dengan melibatkan 1.800 responden. Dalam riset tersebut menunjukkan bahwa sebahagian besar perempuan mengalami tingkat stres yang tinggi dibandingkan laki-laki dalam penggunaan *media sosial* ini. Hal ini khususnya terlihat pada pengguna aplikasi twitter di media sosial mereka.
- b. Seorang peneliti Austria di tahun 2014 menyebutkan bahwa sebagian orang menurun suasana hatinya setelah menyaksikan *facebook* selama 20 menit. Sementara penelitian yang dilakukan oleh California University menyatakan mempengaruhi suasana hati, baik atau buruk dari penelitian terhadap 100 juta pengguna *facebook* sepanjang tahun

2009 sampai 2012.

- c. Kecemasan. Dalam Jurnal *Computer and Human Behavior* menyebutkan bahwa pengguna *media sosial* cenderung mengalami kecemasan, khususnya bagi mereka yang menggunakan *media sosial* diatas 6 kali penggunaan aplikasi di *media sosial* mereka. Bahkan cenderung memiliki 3 kali tingkat kecemasan dibanding yang menggunakan *media sosial* dibawah 2 kali sehari.
- d. Depresi. Dalam sejumlah penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan *media sosial* yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan terjadinya depresi. Pada penelitian yang dilakukan tahun 2016 dengan jumlah 1.700 responden menunjukkan bahwa orang mengalami depresi 3 kali lebih tinggi bagi pengguna aplikasi *media sosial* secara berlebihan. Tim peneliti Microsoft mensurvey 476 orang dengan menganalisis profil *twitter-nya* menunjukkan bahwa dari 10 status yang dibuat 7 diantaranya menunjukkan gejala depresi.
- e. Gangguan Tidur. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pittsburgh University terhadap 1.700 responden yang berusia antara 18-30 tahun menyebutkan bahwa ada keterkaitan kebiasaan penggunaan *media sosial* dan gangguan tidur pada mereka.
- f. Kecanduan. *Media sosial* disinyalir juga dapat menyebabkan kecanduan yang dapat membahayakan kondisi psikis penggunanya. Pada tahun 2011, Daria Kuss dan Mark Griffiths dari Universitas Nottingham Inggris yang melakukan kajian terhadap 43 studi kasus, menyebutkan bahwa penggunaan *media sosial* berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental yang memerlukan pendampingan dari psikolog profesional (Ahmad, 2020:139-141).

## B. Twitter

### 1. Pengertian Twitter

Twitter adalah sebuah platform media sosial dan mikroblog yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan teks pendek berisi 140 karakter, yang dikenal sebagai "Tweet." Didirikan oleh Jack Dorsey pada Maret 2006, Twitter diluncurkan pada Juli di tahun yang sama. Sejak itu, platform ini telah menjadi salah satu dari sepuluh situs web paling populer di internet, sering disebut sebagai "pesan singkat dari internet." Pengguna yang tidak terdaftar dapat membaca tweet, sementara pengguna terdaftar dapat menulis tweet melalui berbagai aplikasi seluler, pesan teks (SMS), atau situs web (Zukhrufillah, 2018:103-104). Beberapa istilah digunakan dalam *Twitter* untuk menyebut fitur dan layanan yang disediakan. Berikut adalah penjelasan dari *Twitter* tentang beberapa istilah yang sering dipakai :

- a. *Bio* : deskripsi singkat tentang pemilik akun sepanjang 160 karakter atau kurang.
- b. *Connect* (hubungan) : fitur untuk melihat interaksi, mentions (pemanggilan), *follower* (pengikut) baru, *retweet*, dan pengguna lain yang menandai tweet atau *me-retweet*.
- c. *Favorites* : daftar *tweet* yang ditandai.
- d. *Follow* (ikut) : mengikuti (*following*) akun lain dalam *Twitter* untuk berlangganan *tweet* dari akun tersebut.
- e. *Follower* (pengikut) : akun lain yang mengikuti dan berlangganan *tweet* suatu akun *Twitter*.
- f. *Following* (mengikuti) : jumlah akun lain yang yang diikuti.
- g. *Interactions* (interaksi) : hubungan timbal balik yang terjadi di *Twitter*. Bisa berupa mention dan reply, *retweet*, menambahkan ke sebuah daftar, menandai suatu tweet, *me-retweet* suatu tweet.
- h. *Mention* (memanggil) : *tweet* yang memuat tautan ke akun *Twitter* lain, ditandai dengan adanya tanda @ di depan nama.
- i. *Reply* (balasan) : *tweet* yang merupakan balasan dari *tweet* lain, selalu diawali dengan *mention* ( @ ).

- j. *Retweet* : sebagai kata benda, merupakan *tweet* dari akun lain yang diteruskan kepada *follower* dengan tujuan menyebarkan ke jaringan yang lebih luas. Sebagai kata sifat, aksi meneruskan *tweet* dari akun lain agar dapat dilihat oleh *follower*.
- k. *Quote retweet* adalah *retweet* yang ditulis dalam bentuk kutipan sehingga terlihat seperti *reply* (Rezeki, 2020:67).

## 2. Perkembangan Twitter di Indonesia

Kominfo menginformasikan berdasarkan data PT. Bakrie Telecom (2013), pengguna *Twitter* di Indonesia sendiri mencapai angka 19,5 juta dari total 500 juta pengguna *Twitter*. Adam juga menambahkan berdasarkan penuturan dari *Country Industry Head Twitter* Indonesia dan Malaysia Dwi Ardiansah di Jakarta, persebaran demografi pengguna *Twitter* di Indonesia terdiri dari 53% laki-laki dan 47% perempuan dengan mayoritas usia pengguna berumur 16-24 tahun, disusul sebanyak 36% oleh pengguna berusia 23-34 tahun, 18% pengguna berusia 35-44 tahun, 3% pengguna berusia 45-54 tahun, dan 1% terakhir merupakan pengguna di usia 55-64 tahun (Azzahra, 2021:20).

Menurut laporan *We Are Social*, jumlah pengguna *Twitter* di Indonesia mencapai 18,45 juta pada 2022. Angka tersebut menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara pengguna *Twitter* terbesar di dunia. Berdasarkan persentase pengguna *Twitter*, di Indonesia menunjukkan minat yang cukup tinggi untuk mengoprasikannya, dengan di dorong akses yang mudah, internet yang kuat, serta munculnya berbagai fitur dan berita yang new update. Hal tersebut menjadi daya tarik masyarakat yang menyebabkan muncullah banyak sentimen dan *hashtag* (Rizaty Monavia Ayu, 2022:1-2).

## C. Civic Engagement

### 1. Pengertian Civic Engagement

Civic engagement terdiri dari dua komponen utama, yaitu "civic" dan "engagement". "Civic" pada dasarnya berkaitan dengan

kewarganegaraan atau peran sebagai warga negara. Sementara itu, "engagement" menurut Saltmarsh & Zlotkowski merujuk pada kegiatan berbasis disiplin yang dilakukan di luar konteks akademis, seperti tugas kuliah, proyek riset, magang, pekerjaan lapangan, atau penempatan klinis yang berhubungan dengan komunitas lokal, nasional, atau global. *American Psychological Association* mendefinisikan *civic engagement* sebagai tindakan individu dan kolektif yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu yang menjadi perhatian publik (Usman Alhudawi, 2023:3).

Berdasarkan definisi-definisi ini, civic engagement dapat disimpulkan sebagai konsep yang melibatkan partisipasi aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan kata lain, civic engagement mengacu pada kewarganegaraan (civic) yang mencakup tanggung jawab dan hak kita sebagai warga negara, serta keterlibatan (engagement) dalam berbagai aktivitas, baik di luar maupun di dalam konteks akademis. Ini bisa mencakup partisipasi dalam proyek komunitas, magang, atau kegiatan sosial yang membantu memecahkan masalah publik. Dengan demikian, civic engagement adalah tentang bagaimana individu atau kelompok berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat dan mengatasi masalah yang ada.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Civic Engagement**

Civic engagement merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Agostino dan Viser, beberapa unsur utama yang memengaruhi civic engagement antara lain adalah hambatan sosial, budaya, politik, serta peran organisasi berbasis komunitas, keagamaan, dan sekolah. Setiap unsur ini memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar keterlibatan individu dalam kegiatan sosial dan politik. Agostino dan Viser mengungkapkan bahwasanya ada beberapa unsur yang mempengaruhi civic engagement (Kezia, 2017: 11-12) yaitu :

- a. *Social barriers* adalah halangan sosial yang bisa diakibatkan oleh keterbatasan lokasi komunitas. Permasalahan ini dapat diakibatkan adanya stratifikasi dan distribusi kekuasaan yang berpengaruh terhadap kepercayaan dan kolaborasi antar kelompok. Juga perbedaan sosial antara kaum muda dengan kelompok/komunitas.
- b. *Cultural barriers* adalah halangan budaya muncul lewat interpretasi, penggunaan, dan pendapat simbol dan aspek tidak berwujud misalnya tugas keluarga dan pemahaman sosial, keamanan dan jenis kelamin.
- c. *Political barriers* adalah halangan politik yang menangkai kemampuan kaum muda untuk mengakses peluang atau dukungan keuangan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi.
- d. *Community-based Organization* adalah sebuah organisasi yang berupaya melibatkan pemuda melalui program sekolah menengah, program pemuda, kegiatan pemuda, program komunitas, ekstrakurikuler, maupun program setelah sekolah yang berlangsung di dalam maupun luar sekolah dan program keagamaan.
- e. *Faith-based Organization* adalah komunitas keagamaan yang didukung atau didirikan oleh lembaga keagamaan. Bergaul dengan kelompok lewat kegiatan keagamaan seperti berdoa, beribadah, studi kitab suci, ajaran agama, dan bersaksi.
- f. *School-based Organization* adalah komunitas berbasis sekolah memberikan kesempatan buat ikut serta pada partisipasi warga pada sekolah.

### 3. Aspek Civic Engagement

Doolittle (Kezia, 2017:10-11) mengungkapkan bahwasanya *Civic engagement* memiliki dua aspek, yaitu:

- a. Sikap diartikan sebagai kepercayaan yang dimiliki seseorang tentang partisipasi dalam masyarakat dan yakin bahwa mereka mampu membuat perubahan pada masyarakat.
- b. Perilaku diartikan dengan tindakan untuk turut aktif berusaha dan membuat perubahan pada komunitasnya.

## D. Demokrasi

### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani "*Demokratia*" yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata "*Demos*" dan "*Kratos*". *Demos* yang memiliki arti rakyat dan *Kratos* yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli :

- a. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
- b. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- c. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
- d. Demokrasi menurut H. Harris Soche ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang

diserahkan untuk memerintah.

- e. Demokrasi menurut International Commission of Juris adalah bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.

## **2. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.**

- a. Periode Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

Demokrasi dimasa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamkan. Namun demikian model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia, dengan alasan karena lemahnya budaya demokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktekkan demokrasi model barat. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama.

Akibatnya, pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masanya jarang dapat bertahan lama. Koalisi yang dibangun dengan sangat mudah pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional yang mengancam integrasi nasional yang sedang dibangun. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontakan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalanya demokrasi itu sendiri.

Faktor-faktor disintegrasi diatas, ditambah dengan kegagalan partai-partai dalam majelis konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden pada 5 juli 1959 yang menegaskan berlakunya kembali undang- undang dasar 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir, diganti oleh demokrasi terpimpin yang memposisikan presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan Negara.

b. Periode Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

Pada periode ini lebih di kenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI dalam panggung politik nasional, dan juga pengetatan berita-berita di media pada waktu itu. Hal ini di sebabkan oleh lahirnya dekrit presiden 5 juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan nasional personal yang kuat.

Walaupun didalam UUD 1945 memberi peluang presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun ketetapan MPRS No. III/ 1963 mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dengan lahirnya ketetapan MPRS ini secara otomatis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD 1945. Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melakukan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan UUD 1945. Dengan contoh pada tahun 1960 presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari hasil pemilihan umum, hal semacam ini merupakan adanya pelanggaranpelanggaran terhadap demokrasi atau proses demokrasi. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian.

Dengan kata lain, sejak diberlakukan dekrit presiden 1959 telah terjadi penyimpangan konstitusi oleh presiden. Demokrasi terpimpin dalam model Soekarno adalah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutisme dan terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin, dan pada saat yang sama hilangnya kontrol sosial, keseimbangan (check and balance), diantara legislatif terhadap eksekutif. Dalam kehidupan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol. Bersandar pada dekrit presiden 5 juli sebagai sumber hukum didirikan banyak badan ekstra

konstitusional seperti front nasional yang digunakan oleh PKI sebagai kegiatan wadah politik. Front nasional telah dimanipulasi oleh PKI untuk menjadi bagian strategi taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya demokrasi rakyat. Strategi politik PKI untuk mendulang keuntungan dari kharisma kepemimpinan presiden Soekarno dengan cara mendukung pemberedelan pers dan partai politik misalnya Masyumi yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan.

Perilaku politik PKI yang berhaluan sosialis marxis tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh partai politik islam dan kalangan militer (TNI) yang pada waktu itu merupakan salah satu komponen politik penting presiden Soekarno. Akhir dari demokrasi dipimpin presiden Soekarno yang berakibat dari persetujuan politik ideologi santara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang dikenal dengan gerakan 30 september 1965.

c. Periode Demokrasi Orde Baru (1965 – 1998)

Periode ini merupakan masa pemerintahan presiden Soeharto dengan orde barunya. Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. Orde lama, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap undang-undang dasar 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi dipimpin. Seiring pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi dipimpin ala Soekarno telah diganti oleh elite orde baru dengan demokrasi pancasila. Beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang menetapkan masa jabatan presiden seumur hidup untuk presiden Soekarno telah dihapuskan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.

Demokrasi pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas Negara hukum dan

kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga Negara. Ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal yang sangat disayangkan adalah, alih-alih pelaksanaan ajaran pancasila secara murni dan konsekuen, demokrasi pancasila yang dikampanyekan oleh orde baru, baru sebatas retorika politik belaka. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahannya, penguasa orde baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

d. Periode Pasca Orde Baru (Periode Reformasi)

Periode pasca orde baru sering disebut era reformasi. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen. Tuntutan ini ditandai oleh lengsernya presiden Soeharto dari tumpuk kekuasaan orde baru pada Mei 1998. Setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa dengan demokrasi pancasilanya. Penyelewengan atas dasar Negara pancasila oleh penguasa orde baru berdampak pada sikap antipasti sebagian masyarakat terhadap dasar Negara tersebut. Pengalaman pahit yang menimpa pancasila, yang pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh nuansa HAM, berdampak pada keengganan kalangan tokoh reformasi untuk menambahkan atribut tertentu pada kata demokrasi. Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa orde baru, demokrasi yang hendak dikembangkan setelah kejatuhan oleh rezim orde baru adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pasca orde baru erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh (Subandi, 2017: 123-127).

## **E. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Twitter, Demokrasi, dan Civic Engagement.**

### **1. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Twitter.**

Pendidikan kewarganegaraan, yang sering dikenal dengan singkatan PKN, atau dalam Bahasa Inggris disebut *Citizenship education* atau *Civic education*, berhubungan dengan interaksi antara individu dan negara serta status hukum seseorang dalam suatu negara. Interaksi ini diatur oleh hukum yang dibuat oleh rakyat melalui sistem yang berlaku di negara tersebut, seperti demokrasi. Hukum-hukum ini menetapkan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan tugas-tugas warga negara, menjadikannya sebagai hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat yang diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang.

Dalam hal definisi *Citizenship*, kewarganegaraan mencakup hubungan antara individu dan negara yang bersifat publik karena menjadi warga negara berarti menjadi bagian dari masyarakat politik di suatu negara. Dalam era media sosial seperti Twitter, pendidikan kewarganegaraan dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, mendorong partisipasi dalam ruang publik, dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme. Twitter bisa menjadi alat untuk mendukung diskusi, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi aktif dalam isu-isu kewarganegaraan, memperluas jangkauan pendidikan kewarganegaraan ke ranah digital dan global.

### **2. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Demokrasi**

Pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang demokratis dan inklusif. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi penerus yang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta aktif dalam kegiatan politik. Sementara itu, pendidikan demokrasi memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem demokrasi dan bagaimana individu dapat berperan dalam pengambilan keputusan

yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis, serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan ini, diharapkan individu tidak hanya memahami hak dan kewajiban mereka tetapi juga mampu berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini termasuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Menurut Winataputra dan Budimansyah, pendidikan demokrasi merupakan upaya sistematis oleh negara dan masyarakat untuk membantu warga negara memahami, menghayati, dan mengamalkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan peran mereka. Misi pendidikan demokrasi adalah menyediakan akses bagi warga negara untuk mempelajari demokrasi, melakukan kajian konseptual dan praktis tentang demokrasi, serta memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dengan bijaksana dan bertanggung jawab (Delfiyan Widiyanto, 2022: 5).

Dengan demikian, baik pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan demokrasi memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memahami konsep demokrasi. Melalui pendidikan ini, masyarakat dapat terlibat aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, memastikan hak-hak fundamental terpenuhi, dan memperjuangkan keadilan serta kemakmuran sesuai prinsip Pancasila, yang pada akhirnya berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang demokratis.

### **3. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Civic Engagement**

Margaret Stimman Branson mengemukakan bahwa dalam Pendidikan Kewarganegaraan, terdapat tiga kompetensi utama yang harus dikembangkan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), keterampilan kewarganegaraan (Civic Skills), dan sikap kewarganegaraan (Civic Disposition). Civic knowledge berkaitan dengan informasi yang perlu dimiliki oleh warga negara. Civic skills mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi yang diperlukan oleh warga

negara. Sementara itu, civic disposition berhubungan dengan karakter pribadi dan publik yang harus dimiliki dan dipertahankan dalam sistem demokrasi konstitusional.

Ketiga kompetensi ini bertujuan untuk membentuk pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi lebih percaya diri (civic confidence). Mereka yang menguasai pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic competence). Mereka yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menunjukkan komitmen (civic commitment), dan akhirnya, warga negara yang menguasai ketiga aspek—pengetahuan, sikap, dan keterampilan—akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship).

Menurut Djumali, pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan individu dalam menghadapi tantangan hidup baik di masa kini maupun di masa depan. Pendidikan adalah dasar pembentukan karakter individu melalui transfer nilai dan pengetahuan, sehingga mereka dapat menghadapi kehidupan dengan lebih siap. Pendidikan juga penting untuk penerapan ilmu yang didapat guna memecahkan berbagai masalah yang mungkin dihadapi (Djumali & Wijayanti, 2018: 40). Ganeswara menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, baik dari segi substansi maupun pedagogis, dirancang untuk mengembangkan warga negara yang cerdas di semua jalur dan jenjang pendidikan (Dewi & Abdulkarim, 2018: 100-101).

Secara umum, pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi peran dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Pendidikan ini penting untuk menanamkan jiwa sosial pada warga negara, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk membentuk karakter generasi muda yang bijaksana, baik, dan amanah, serta mendorong partisipasi sosial dan keterlibatan dalam aksi sosial. Pendidikan ini juga penting untuk menyampaikan ideologi

Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar kemanusiaan dan keadilan, serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan politik.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk kesadaran, partisipasi, dan keterlibatan warga negara, yang merupakan bagian dari proses menciptakan warganegara yang aktif dan berkomitmen.

#### **4. Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dengan Twitter, Demokrasi, dan Civic Engagement.**

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat. Twitter dapat mendukung tujuan ini dengan menyebarkan informasi dan memfasilitasi diskusi yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Ini meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Dalam konteks Civic engagement, Twitter berperan sebagai platform yang memfasilitasi partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aksi sosial dan politik. Melalui diskusi, kampanye, dan gerakan online, warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka, memobilisasi dukungan untuk isu-isu penting, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Integrasi antara pendidikan kewarganegaraan, Twitter, dan demokrasi menciptakan lingkungan di mana informasi yang akurat dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi dapat tersebar dengan cepat. Ini memperkuat fondasi demokrasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan, media sosial Twitter, demokrasi, dan Civic engagement membentuk ekosistem yang saling mendukung. Melalui kolaborasi ini, masyarakat menjadi lebih sadar secara kewarganegaraan, lebih terlibat dalam kehidupan politik dan sosial, serta lebih memperkuat fondasi demokrasi. Diskusi mengenai kewarganegaraan adalah kompleks dan berkembang dalam berbagai dimensi ruang dan

waktu. Pembahasan kewargaan dibagi menjadi empat aspek yaitu:

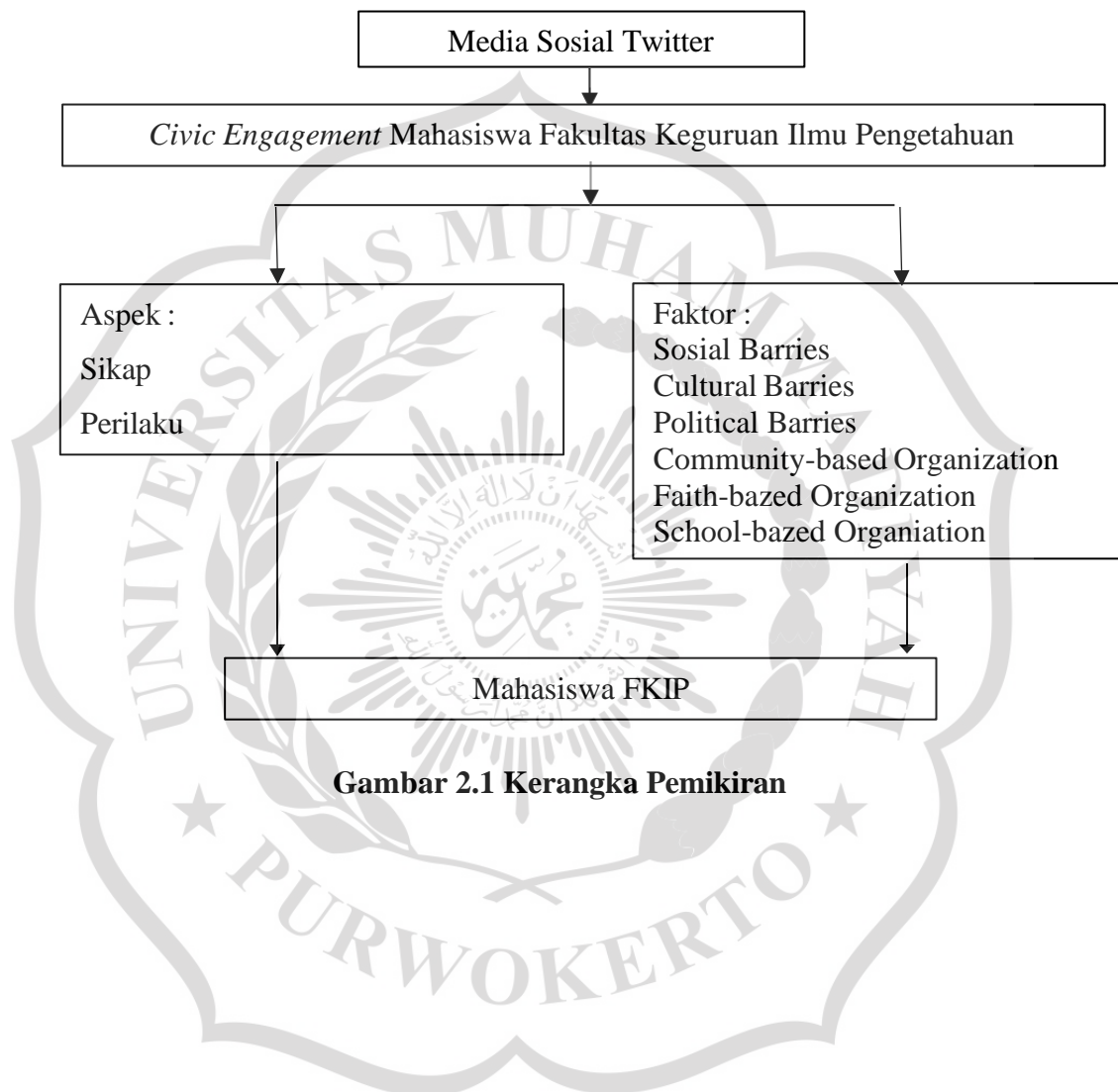
- a. *Content of citizenship* adalah berisikan terkait hak dan kewajiban yang selanjutnya diartikan menjadi warga negara.
- b. *Type of citizenship* adalah focus pada pola partisipatoris dualistik bersifat sosial-politik yang akan dijelaskan oleh negara dengan warganya.
- c. *Condition of citizenship* merupakan wadah hubungan dan kekuasaan sosial yang menghasilkan macam-macam tindakan sosial.
- d. *Arrangement of citizenship* adalah terkait instrumentasi dan operasionalisasi kewarganegaraan sendiri akan diterapkan dan ditanamkan dalam tatanan ruang publik masyarakat (Robert dalam Warsisto; 2014; 25).

#### **5. Peran Twitter terhadap Civic Engagement Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di Era Digital.**

Melalui Twitter, mahasiswa memiliki akses langsung ke berbagai informasi politik dan perkembangan terbaru, memungkinkan mahasiswa untuk tetap terinformasi tentang isu-isu yang relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya itu, Twitter juga menjadi platform untuk mendiskusikan dan berdebat tentang isu-isu politik yang kompleks. Pengguna dapat berbagi pandangan mahasiswa, bertukar pendapat, dan mempertanyakan pemimpin politik serta pembuat kebijakan. Ini menciptakan ruang untuk dialog demokratis yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat. Selain sebagai sarana untuk berdiskusi, Twitter juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses politik dengan mengadakan kampanye politik online, diskusi forum, dan ajakan untuk bertindak. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab warga negara untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep pemikiran yang menafsirkan secara garis besar alur berjalannya sebuah penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun kerangka penelitian ini yaitu :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penelitian masa lalu harus benar-benar dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, hasil pencarian mengenai dengan nama penelitian yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut :

1. Janeti Rui Saumi (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) peserta didik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram dapat mempengaruhi kecerdasan peserta didik.
2. Cahaya Erizha Saputri (2019) melakukan penelitian tentang pengembangan *civic skill* peserta didik oleh guru PPKn di MTs Al- Ikhlas Tanjung Bintang Lampung Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa guru PPKn telah berhasil mengembangkan keterampilan kewarganegaraan peserta yang dibesarkan melalui mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan.
3. Yuni Adisari Sinaga (2023) melakukan skripsi tentang peran e-book sebagai sumber belajar dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa e-book dapat menjadi sumber belajar yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan.
4. Dwi Dwy Sapitri (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial Instagram terhadap keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) peserta didik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial Instagram cenderung menghambat keterampilan kewarganegaraan peserta didik.
5. Nurul Hidayah (2019) skripsi tentang pengaruh penggunaan Instagram terhadap keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan Instagram dapat mempengaruhi kecerdasan siswa.